



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**  
**SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II  
TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

## **TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN DANA DESA**

### Pasal 3

Rincian Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

### Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten Luwu.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten Luwu.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten Luwu.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa se kabupaten Luwu.
- DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten Luwu.
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Luwu.

## Pasal 7

Angka kemiskinan desa dan Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu pada data yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

## **BAB IV PENYALURAN**

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (*empat puluh perseratus*);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (*empat puluh perseratus*); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (*dua puluh perseratus*).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (*limapuluh perseratus*).
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (*lima puluh perseratus*).
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

## **BAB V PENGUNAAN**

### Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

### Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB VI PELAPORAN**

### Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Luwu  
pada tanggal 13 Januari 2016

**BUPATI LUWU,**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 13 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 13



TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU  
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1	KANNA	565,640,000	40,307,602	605,948,000	
2	KANNA UTARA	565,640,000	74,812,700	640,453,000	
3	TABI	565,640,000	44,546,544	610,187,000	
4	BOLU	565,640,000	39,418,172	605,058,000	
5	LANGE	565,640,000	38,636,506	604,277,000	
6	SINAJI	565,640,000	47,169,688	612,810,000	
7	MAPPE TAJANG	565,640,000	41,025,562	606,666,000	
8	ANDULAN	565,640,000	29,519,147	595,159,000	
9	BUNTU BATU	565,640,000	44,584,796	610,225,000	
10	LEDAN	565,640,000	51,808,035	617,448,000	
11	LISSAGA	565,640,000	30,721,599	596,362,000	
12	TO'LONG	565,640,000	51,018,297	616,658,000	
13	RANTE BELU	565,640,000	46,239,309	611,879,000	
14	KOMBA	565,640,000	59,504,719	625,145,000	
15	LUMARING	565,640,000	65,889,923	631,530,000	
16	BINTURU	565,640,000	65,008,224	630,648,000	
17	BILANTE	565,640,000	27,617,233	593,257,000	
18	RANTE ALANG	565,640,000	68,917,065	634,557,000	
19	RIWANG	565,640,000	41,779,029	607,419,000	
20	BUNTU MATABING	565,640,000	35,227,626	600,868,000	
21	BUKIT SUTRA	565,640,000	79,448,482	645,088,000	
22	RIWANG SELATAN	565,640,000	28,981,256	594,621,000	
23	KOMBA SELATAN	565,640,000	40,148,207	605,788,000	
24	BUNTU PASIK	565,640,000	36,256,091	601,896,000	
25	MURANTE	565,640,000	47,445,524	613,086,000	
26	MALELA	565,640,000	46,993,196	612,633,000	
27	BOTTA	565,640,000	61,171,925	626,812,000	
28	CIMPU	565,640,000	51,364,097	617,004,000	
29	BUNTU KUNYI	565,640,000	44,590,377	610,230,000	
30	PADANG LAMBE	565,640,000	35,143,937	600,784,000	
31	KASIWIANG	565,640,000	27,706,595	593,347,000	
32	CAKKEAWO	565,640,000	33,497,369	599,137,000	
33	LEMPOPACCI	565,640,000	39,956,980	605,597,000	
34	TOWONDO	565,640,000	54,200,948	619,841,000	
35	CIMPU UTARA	565,640,000	50,269,753	615,910,000	
36	PAPAKAJU	565,640,000	48,043,743	613,684,000	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
37	RUMAJU	565,640,000	43,626,799	609,267,000	
38	SAMPA	565,640,000	43,706,030	609,346,000	
39	PANGI	565,640,000	41,542,029	607,182,000	
40	TALANG BULAWANG	565,640,000	69,660,299	635,300,000	
41	JAMBU	565,640,000	31,992,527	597,633,000	
42	SAGA	565,640,000	29,229,354	594,869,000	
43	SUMABU	565,640,000	35,508,618	601,149,000	
44	BALLA	565,640,000	26,282,467	591,922,000	
45	LANGKIDDI	565,640,000	43,728,999	609,369,000	
46	SAMULANG	565,640,000	27,974,857	593,615,000	
47	BUNTU BABANG	565,640,000	59,583,032	625,223,000	
48	TANJONG	565,640,000	50,447,428	616,087,000	
49	BUNTU BATU	565,640,000	55,580,572	621,221,000	
50	TAMPUMIA	565,640,000	36,790,756	602,431,000	
51	PADANG TUJU	565,640,000	41,718,478	607,358,000	
52	PADANG KAMBURI	565,640,000	23,357,062	588,997,000	
53	MALENGGANG	565,640,000	50,672,856	616,313,000	
54	BALUTAN	565,640,000	74,146,367	639,786,000	
55	PADANG MA'BUD	565,640,000	37,582,532	603,223,000	
56	SALUINDUK	565,640,000	36,270,018	601,910,000	
57	TOMBANG	565,640,000	77,780,180	643,420,000	
58	LALONG	565,640,000	67,227,679	632,868,000	
59	HARAPAN	565,640,000	57,815,710	623,456,000	
60	BARAMMAMASE	565,640,000	67,954,353	633,594,000	
61	WALENRANG	565,640,000	53,879,809	619,520,000	
62	SARAGI	565,640,000	36,958,133	602,598,000	
63	BATU SITANDUK	565,640,000	57,452,619	623,093,000	
64	KALIBAMAMASE	565,640,000	40,996,310	606,636,000	
65	KURUSUMANGA	565,640,000	25,106,753	590,747,000	
66	BELOPA	565,640,000	50,765,606	616,406,000	
67	SENGA SELATAN	565,640,000	60,766,605	626,407,000	
68	BALUBU	565,640,000	30,217,981	595,858,000	
69	PASAMAI	565,640,000	35,733,432	601,373,000	
70	BAROWA	565,640,000	47,166,852	612,807,000	
71	PUTY	565,640,000	83,488,648	649,129,000	
72	RAJA	565,640,000	65,182,463	630,822,000	
73	POSI	565,640,000	68,887,960	634,528,000	
74	KARANG-KARANGAN	565,640,000	43,668,660	609,309,000	
75	LARE-LARE	565,640,000	57,838,155	623,478,000	
76	LENGKONG	565,640,000	55,501,251	621,141,000	
77	TIROMANDA	565,640,000	61,061,890	626,702,000	
78	TANA RIGELLA	565,640,000	34,038,831	599,679,000	
79	BUKIT HARAPAN	565,640,000	33,802,402	599,442,000	
80	PADANG KALUA	565,640,000	30,104,866	595,745,000	
81	PAMMESAKANG	565,640,000	38,241,294	603,881,000	
82	PABBARESSENG	565,640,000	47,508,479	613,148,000	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
83	TODDOPULI	565,640,000	45,403,058	611,043,000	
84	SALU JAMBU	565,640,000	49,016,766	614,657,000	
85	WIWITAN	565,640,000	30,374,364	596,014,000	
86	SETIA REJO	565,640,000	48,980,132	614,620,000	
87	PONGSAMELUNG	565,640,000	74,364,489	640,004,000	
88	PADANG KALUA	565,640,000	53,328,909	618,969,000	
89	TO'PONGO	565,640,000	61,462,990	627,103,000	
90	SE'PONG	565,640,000	36,213,902	601,854,000	
91	AWO GADING	565,640,000	31,693,338	597,333,000	
92	WIWITAN TIMUR	565,640,000	52,380,178	618,020,000	
93	TEMBOE	565,640,000	44,193,896	609,834,000	
94	SAMPANO	565,640,000	53,700,488	619,340,000	
95	BABANG	565,640,000	46,807,627	612,448,000	
96	LA'LOA	565,640,000	41,183,026	606,823,000	
97	BATU LAPPA	565,640,000	38,380,575	604,021,000	
98	MALEWONG	565,640,000	57,616,239	623,256,000	
99	SALUSANA	565,640,000	57,632,096	623,272,000	
100	DADEKO	565,640,000	35,420,891	601,061,000	
101	GANDANG BATU	565,640,000	36,702,294	602,342,000	
102	TIROWALI	565,640,000	63,773,055	629,413,000	
103	MARIO	565,640,000	39,608,465	605,248,000	
104	MULADIMENG	565,640,000	69,832,356	635,472,000	
105	BUNTU KAMIRI	565,640,000	75,044,311	640,684,000	
106	TUMALE	565,640,000	63,694,722	629,335,000	
107	BUNTU NANNA	565,640,000	78,705,672	644,346,000	
108	TAMPA	565,640,000	58,425,815	624,066,000	
109	PAREKAJU	565,640,000	46,137,475	611,777,000	
110	RANTE BALLA	565,640,000	77,221,705	642,862,000	
111	KADUNDUNG	565,640,000	49,059,860	614,700,000	
112	ULUSALU	565,640,000	44,537,030	610,177,000	
113	LAMBANAN	565,640,000	49,143,737	614,784,000	
114	TABANG	565,640,000	65,437,768	631,078,000	
115	BONE POSI	565,640,000	49,317,586	614,958,000	
116	PANGI	565,640,000	63,623,566	629,264,000	
117	PAJANG	565,640,000	41,651,301	607,291,000	
118	BUNTU SAREK	565,640,000	56,597,523	622,238,000	
119	TO'BARRU	565,640,000	38,764,687	604,405,000	
120	TIBUSSAN	565,640,000	45,212,244	610,852,000	
121	TO'LAJUK	565,640,000	27,833,750	593,474,000	
122	KAMANRE	565,640,000	33,612,370	599,252,000	
123	TABBAJA	565,640,000	37,370,935	603,011,000	
124	LIBUKANG	565,640,000	59,775,791	625,416,000	
125	WARA	565,640,000	40,986,267	606,626,000	
126	SALU PAREMANG	565,640,000	33,827,978	599,468,000	
127	SALUPAREMANG SELATAN	565,640,000	37,893,958	603,534,000	
128	BUNGA EJA	565,640,000	25,805,316	591,445,000	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
129	LAMUNRE	565,640,000	32,223,545	597,864,000	
130	LAUWA	565,640,000	39,036,748	604,677,000	
131	SEPPONG	565,640,000	43,786,818	609,427,000	
132	PACONNE	565,640,000	21,944,196	587,584,000	
133	LEBANI	565,640,000	27,375,381	593,015,000	
134	LAMUNRE TENGAH	565,640,000	42,910,132	608,550,000	
135	ILAN BATU	565,640,000	74,870,463	640,510,000	
136	ILAN BATU URU	565,640,000	183,376,177	749,016,000	
137	LEMPE PASANG	565,640,000	71,630,666	637,271,000	
138	LAMASI HULU	565,640,000	72,000,608	637,641,000	
139	LEMPE	565,640,000	61,232,350	626,872,000	
140	LEWANDI	565,640,000	75,195,457	640,835,000	
141	SALU TUBU	565,640,000	61,321,227	626,961,000	
142	SITEBA	565,640,000	72,086,622	637,727,000	
143	BOLONG	565,640,000	48,650,585	614,291,000	
144	PONGKO	565,640,000	70,123,337	635,763,000	
145	BUNTU AWO	565,640,000	55,175,584	620,816,000	
146	MARABUANA	565,640,000	65,553,237	631,193,000	
147	SALULINO	565,640,000	50,940,893	616,581,000	
148	SANGTANDUNG	565,640,000	71,857,303	637,497,000	
149	BOSSO TIMUR	565,640,000	35,151,349	600,791,000	
150	LIMBONG	565,640,000	41,300,113	606,940,000	
151	LAMASI PANTAI	565,640,000	55,275,321	620,915,000	
152	TANETE	565,640,000	59,359,557	625,000,000	
153	RANTE DAMAI	565,640,000	49,270,712	614,911,000	
154	TABA	565,640,000	64,738,307	630,378,000	
155	KENDEKAN	565,640,000	83,762,942	649,403,000	
156	PANGALLI	565,640,000	47,467,620	613,108,000	
157	SEBA-SEBA	565,640,000	68,559,162	634,199,000	
158	SUKA DAMAI	565,640,000	75,691,594	641,332,000	
159	POMPENGAN	565,640,000	69,278,062	634,918,000	
160	BULOLONDONG	565,640,000	84,162,349	649,802,000	
161	POMPENGAN PANTAI	565,640,000	43,876,180	609,516,000	
162	SERITI	565,640,000	46,577,290	612,217,000	
163	SALUPAO	565,640,000	66,263,740	631,904,000	
164	TO'LEMO	565,640,000	53,584,236	619,224,000	
165	PELALAN	565,640,000	65,446,916	631,087,000	
166	POMPENGAN TENGAH	565,640,000	53,863,379	619,503,000	
167	POMPENGAN UTARA	565,640,000	52,869,834	618,510,000	
168	BUNTU BARANA	565,640,000	34,896,955	600,537,000	
169	PORINGAN	565,640,000	75,069,600	640,710,000	
170	SALUBUA	565,640,000	59,673,764	625,314,000	
171	KAILI	565,640,000	68,446,290	634,086,000	
172	MUHAJIRIN	565,640,000	33,952,933	599,593,000	
173	TALLANG	565,640,000	31,181,805	596,822,000	
174	KALADI DARUSSALAM	565,640,000	66,990,907	632,631,000	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
175	BONE LEMO	565,640,000	39,494,062	605,134,000	
176	SAMPEANG	565,640,000	45,365,975	611,006,000	
177	MARINDING	565,640,000	38,489,271	604,129,000	
178	SARONDA	565,640,000	45,885,765	611,526,000	
179	KADONG KADONG	565,640,000	39,452,801	605,093,000	
180	TUMBU BARAK	565,640,000	39,882,303	605,522,000	
181	TETTEKANG	565,640,000	26,880,926	592,521,000	
182	BONELEMO UTARA	565,640,000	60,329,535	625,970,000	
183	BONELEMO BARAT	565,640,000	44,140,640	609,781,000	
184	JE'NE MAEJA	565,640,000	47,878,999	613,519,000	
185	BAKTI	565,640,000	43,367,640	609,008,000	
186	BUNTU KARYA	565,640,000	45,556,334	611,196,000	
187	OLANG	565,640,000	67,288,029	632,928,000	
188	BASSIANG	565,640,000	50,848,835	616,489,000	
189	PACCERAKKANG	565,640,000	76,422,669	642,063,000	
190	LAMPUARA	565,640,000	54,682,117	620,322,000	
191	TO'BALO	565,640,000	25,992,805	591,633,000	
192	TO'BIA	565,640,000	38,322,676	603,963,000	
193	BASSIANG TIMUR	565,640,000	59,059,386	624,699,000	
194	PATTEDONG SELATAN	565,640,000	34,569,356	600,209,000	
195	TARRAMATEKKENG	565,640,000	38,508,859	604,149,000	
196	BONGLO	565,640,000	38,752,706	604,393,000	
197	TEDE	565,640,000	54,706,059	620,346,000	
198	BARANA	565,640,000	46,535,548	612,176,000	
199	URASO	565,640,000	51,745,144	617,385,000	
200	KARATUAN	565,640,000	51,839,837	617,480,000	
201	SALUBUA	565,640,000	38,589,869	604,230,000	
202	PANTILANG	565,640,000	55,607,425	621,247,000	
203	BUNTU TALLANG	565,640,000	38,007,782	603,648,000	
204	DAMPAN	565,640,000	48,857,970	614,498,000	
205	MAINDO	565,640,000	56,374,233	622,014,000	
206	TASANGTONGKONAN	565,640,000	48,285,386	613,925,000	
207	TA'BA	565,640,000	40,443,054	606,083,000	
<b>Total</b>		<b>117,087,480,000</b>	<b>10,385,435,000</b>	<b>127,472,917,000</b>	

BUPATI LUWU,

**A. MUZAKKAR**